

DAFTAR INFORMASI INFORMASI PUBLIK (DIP) DAN DAFTAR YANG DIKECUALIAKAN (DIK) TAHUN 2026

BIDANG : KETRANSMIGRASIAN

No.	Jenis Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
1	Berita Acara Serah Terima dan SK Penempatan Transmigasi	UU Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa Peraturan Menteri Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2024 regulasi mengenai Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;	Memuat rincian hak dan fasilitas yang diterima, seperti lahan pekarangan, lahan usaha, bantuan jaminan hidup, serta sarana produksi. Ketentuan umum Kawasan Transmigrasi, perencanaan Kawasan Transmigrasi dan Penyediaan tanah Transmigrasi, pembangunan Kawasan Transmigrasi, pengembangan Kawasan Transmigrasi, jenis Transmigrasi dan pola usaha pokok, Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi untu Berita Acara Serah Terima Transmigrasi, koordinasi dan pengawasan ketransmigasian	-	tidak terbatas
2	SK Desa Defenitif	Peraturan Menteri Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Transformasi Transmigrasi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 8 Mengatur secara spesifik tentang pembentukan desa baru Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Ketransmigrasian Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2026 Tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014	Memuat tentang Transformasi Transmigrasi yang mempertegas tata kelola dan penjaminan kepastian hukum hak atas tanah/lahan bagi transmigran, tentang Desa yang menjadi payung hukum utama seluruh pembentukan dan penetapan status desa di Indonesia, mengatur bahwa jika permukiman transmigrasi telah diserahkan pembinaannya kepada Pemerintah Daerah, statusnya resmi berubah menjadi desa definitif dan status ketransmigrasiannya berakhir.	-	tidak terbatas
3	Peta Kawasan Transmigrasi	Permen Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Kriteria dan Tata Cara Penilaian Serta Tata Cara Penetapan Kawasan Transmigrasi PP Nomor 37 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Keimigrasian Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian; Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian	Memuat Untuk rincian spasial, pemetaan persebaran lokasi transmigrasi, dan Pengendalian Penguasaan Tanah di Kawasan Transmigrasi	-	tidak terbatas
4	Penyelesaian Permasalahan Lahan Transmigrasi	Peraturan Menteri Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Transformasi Transmigrasi Peraturan Menteri Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Renana Strategis Kementerian Transmigrasi Tahun 2025-2029 Peraturan Menteri Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2025 tentang Transformasi Transmigrasi yang PP Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah	Memuat tata kelola dan penjaminan kepastian hukum hak atas tanah/lahan bagi transmigran. Kebijakan ini ditujukan untuk memberikan kepastian hukum, menyelesaikan sengketa lahan, dan menata kawasan transmigrasi, seperti Permasalahan tumpang tindih kawasan hutan atau hak guna usaha (HGU), permasalahan sengketa waris atau antar warga dan proses penerbitan dan peningkatan sertifikat lahan.	-	tidak terbatas

Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan
Permendesa Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Penerapan Desain Konsolidasi Tanah Transmigrasi
Surat Edaran Menteri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Penjelasan Status Tanah Restan di Kawasan Transmigrasi
Surat Edaran Menteri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Penjelasan Status Tanah Restan di Kawasan Transmigrasi